

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Indonesia merupakan suatu Negara yang memiliki wilayah geografis luas terbagi menjadi kepulauan-kepulauan. Hal ini menjadikan Indonesia memiliki beragam suku dan budaya, namun tetap menjunjung Bhineka Tunggal Ika, sesuai dengan landasan Negara Indonesia yaitu Pancasila terutama sila ke-3 tentang persatuan Indonesia. Dalam sila ke-5 yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dan disebutkan didalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 tentang memajukan kesejahteraan umum, maka seluruh rakyat Indonesia mempunyai hak yang sama untuk mendapatkannya. Dalam rangka mencapai keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat, pemerintah merubah sistem pemerintahan dari sistem sentralisasi menjadi sistem desentralisasi.

Sejak diterbitkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Otonomi Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Berdasarkan undang-undnag tersebut pemerintah pusat memberikan keleluasan bagi pemerintah daerah untuk mengurus rumah tangganya sendiri. Diharapkan dengan adanya desentralisasi setiap daerah semakin efisien dan efektif dalam mengelola proses pembangunannya karena daerah telah diberikan wewenang dan kebebasan yang luas oleh pemerintah pusat untuk mengatur kebijakan-kebijakan penting demi kemajuan daerahnya. Pelaksanaan Otonomi Daerah

akan memberi dampak lebih baik terhadap layanan yang diberikan pemerintah kepada masyarakat (publik).

Pemerintah daerah memiliki perkembangan menuju ke arah yang lebih baik dalam beberapa waktu terakhir. Perkembangan ini juga akan semakin menguatkan tuntutan transparansi dan akuntabilitas dari masyarakat tentang penggunaan anggaran. Bentuk tanggungjawab dari tuntutan mengenai tercapainya transparansi serta akuntabilitas ialah setiap daerah berkewajiban untuk membuat laporan keuangan daerah yang memenuhi prinsip tepat waktu dan mempublikasikannya terhadap para pemangku kepentingan. Penyampaian laporan keuangan tentang pemakaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang di buat harus sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah.

Seperti yang tercantum dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 282 dikatakan :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوا هُوَ لَكُمْ خَيْرٌ مِّنْكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ ۚ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا بِيخْسٍ مِنْهُ شَيْئًا ۚ فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ نِ يُمْلَ هُوَ فليُمْلِلْ وَلِيَّهُ بِالْعَدْلِ ۚ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكَّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى ۚ وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا ۚ وَلَا تَسْأَمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ ۚ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمٌ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا ۚ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا ۚ وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ ۚ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ ۚ وَإِنْ تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ فَسُوقٌ بِكُمْ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ ۚ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah

kamu menulisnya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menulisnya dengan adil. Dan janganlah penulis enggan menulisnya sebagaimana Allah mengajarkannya, maka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. Jika yang berhutang itu orang yang lemah akalanya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). Jika bukan dua orang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa maka yang seorang lagi mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar, sampai batas waktu membayarnya. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih dapat menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguan kamu. Tetapi jika ia merupakan perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi memudahkan yang bermuamalah (dan jangan juga yang bermuamalah memudahkan para saksi dan penulis). Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada diri kamu. Dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu.”.

Sebagai bentuk pertanggungjawaban pemerintah daerah terhadap penggunaan anggaran maka dalam setiap kegiatan transaksi harus dicatat sehingga akuntabilitas dan transparansi dalam laporan keuangan akan tercapai. Laporan keuangan menurut pada pernyataan standar akuntansi pemerintahan nomor 1 paragraf 9 sebagaimana terdapat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 mengenai Standar Akuntansi Pemerintahan adalah sebuah laporan yang dibuat secara terstruktur yang berkaitan dengan posisi keuangan serta transaksi-transaksi yang telah dilakukan oleh entitas pelaporan. Tujuan dari dibuatnya laporan keuangan ialah memberikan informasi terkait laporan posisi keuangan, arus kas, dan kinerja keuangan dari suatu entitas yang akan berguna bagi para pemangku kepentingan dalam menentukan pengambilan keputusan mengenai alokasi

sumber daya. Kualitas dari laporan keuangan itu sendiri merupakan bagaimana laporan keuangan yang disajikan dapat menunjukkan informasi yang benar dan jujur.

Laporan keuangan yang berkualitas tentunya membutuhkan peran dari adanya sumber daya manusia yang memiliki kompetensi dalam bidang akuntansi pemerintahan, keuangan daerah dan organisasional di pemerintahan. Dengan sumber daya manusia yang berkompeten dapat mendukung kualitas yang lebih baik dari laporan keuangan yang dihasilkan. Selain sumber daya manusia yang berkompeten terdapat aspek penting lain dalam penyusunan laporan keuangan yaitu adanya sistem akuntansi. Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD) merupakan tata cara pembuatan laporan keuangan yang diawali dari proses pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran sebagai bentuk pertanggungjawaban penggunaan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Hal lain yang tidak dapat diabaikan dalam penyusunan laporan keuangan yaitu adanya pengendalian intern serta teknologi informasi. Pengendalian intern merupakan suatu sistem yang diterapkan guna tercapainya tujuan utama dalam hal ini dapat menghasilkan laporan keuangan yang sesuai dengan standar yang ada dan supaya tidak terjadi penyalahgunaan kewenangan. Pemanfaatan teknologi informasi dibutuhkan untuk mendukung dan mempermudah sumberdaya manusia yang ada dalam membuat laporan keuangan menggunakan software yang ada.

Fenomena yang terjadi pada saat ini dari hasil pemeriksaan laporan keuangan daerah dari tahun 2011-2015.

Tabel 1.1
Opini LKPD dari Tahun 2011-2015

Tahun	Opini LKPD Seluruh Tingkat Pemerintahan			
	TW	TMP	WDP	WTP
2011	1%	19%	67%	13%
2012	1%	15%	61%	23%
2013	2%	9%	59%	30%
2014	1%	6%	46%	47%
2015	1%	6%	35%	58%

Sumber: www.bpk.id

Dihat dari tabel 1.1 diatas merupakan hasil audit BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) terhadap laporan keuangan yang terdiri dari pemerintahan pusat, pemerintahan kabupaten dan pemerintahan kota tahun 2011-2015, menunjukkan bahwa terjadi peningkatan pemberian opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) dari 13% pada tahun 2011 menjadi 58% pada tahun 2015, terjadi peningkatan sebesar 45%. LKPD yang mendapatkan opini WDP mengalami penurunan sebesar 32%, di tahun 2011, 67% di tahun 2015 menjadi 35%. Penurunan juga terjadi pada LKPD yang mendapat opini TMP sebesar 13%, sedangkan LKPD yang mendapat opini TW dari BPK tetap 1 %, sempat mengalami kenaikan menjadi 2% pada tahun 2013. Dari data yang ada menunjukkan bahwa semakin banyak laporan keuangan pemerintah daerah yang disusun telah memenuhi kriteria yang sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Fenomena yang terjadi dari hasil audit terhadap kualitas laporan keuangan daerah di tingkat Pemerintahan Kabupaten dari tahun 2011-2015.

Tabel 1.2
Opini LKPD Tingkat Pemerintahan Kabupaten
Tahun 2011-2015

Tahun	Opini LKPD Seluruh Tingkat Pemerintahan Kabupaten			
	TW	TMP	WDP	WTP
2011	2%	22%	57%	9%
2012	2%	17%	63%	18%
2013	3%	10%	61%	26%
2014	1%	8%	50%	41%
2015	1%	7%	37%	65%

Sumber : www.bpk.go.id

Tabel diatas menunjukkan terjadinya peningkatan kualitas LKPD pada setiap tingkat pemerintahan, seperti pada pemerintahan Kabupaten yang mengalami peningkatan cukup signifikan dimana LKPD yang mendapat opini WTP di tahun 2011 sebesar 9% menjadi 65% pada tahun 2015 ini berarti terjadi peningkatan sebesar 56%.

Walaupun setiap tahunnya LKPD yang memperoleh predikat opini WTP meningkat, namun kenyataannya masih terdapat banyak LKPD yang telah diaudit belum mendapatkan predikat wajar tanpa pengecualian dari Badan Pemeriksa Keuangan. Bahkan terdapat juga LKPD yang justru mengalami penurunan opini. BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) mengemukakan bahwa sebagian masalah terkait laporan keuangan ini di sebabkan karena masih banyak pemerintah daerah yang menyajikan LKPD tidak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah, penerapan sistem pengendalian intern yang belum baik dan tidak sesuai dengan aturan-aturan undang-undang yang berlaku.

Fenomena perkembangan opini laporan keuangan daerah dari Kabupaten Cilacap dan Kabupaten Banyumas dari tahun 2011-2015.

Tabel 1.3
Perkembangan Opini LKPD

Nama Kabupaten/ Tahun	Kabupaten Cilacap	Kabupaten Banyumas
2011	WDP	WTP
2012	WDP	WTP
2013	WDP	WTP
2014	WDP	WTP
2015	WDP	WTP

Sumber : www.bpk.go.id

Namun juga ada LKPD yang tidak mengalami peningkatan atau bahkan tetap mempertahankan kualitas. Seperti yang terjadi pada LKPD pemerintah kabupaten Cilacap yang tidak mengalami peningkatan selama 5 tahun mendapat opini WDP dari BPK, berbeda dengan LKPD pemerintah kabupaten Banyumas yang tetap mempertahankan opini WTP selama 5 tahun berturut-turut.

Adapun hasil penelitian-penelitian sebestumnya tentang kualitas laporan keuangan pemerintah daerah yaitu Andini dan Yusrawati (2015) menunjukkan hasil penelitian dimana kompetensi sumber daya manusia dan penerapan sistem akuntansi keuangan daerah memiliki pengaruh positif signifikan terhadap kualitas laporan keuangan daerah. Penelitian mengenai pengaruh kompetensi sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan daerah juga pernah dilakukan oleh Setiawati dan Sari (2014) dan Rahayu, dkk (2014) juga menunjukkan hasil pengaruh positif yang signifikan.

Penelitian yang dilakukan oleh Wansyah, dkk (2012) dan Winidyaningrum dan Rahmawati (2010) menunjukkan hasil bahwa terdapat pengaruh positif signifikan dari pemanfaatan teknologi informasi terhadap kualitas laporan keuangan daerah. Penelitian mengenai pengaruh pengendalian intern terhadap kualitas laporan keuangan daerah pernah dilakukan oleh Putri, dkk (2015) dan Setiawati dan Sari (2014) menunjukkan hasil bahwa terdapat pengaruh positif dan signifikan. Penelitian ini merupakan penggabungan antara penelitian Andini dan Yusrawati (2015) dan Setiawati dan Sari (2014), perbedaan dengan penelitian sebelumnya adalah dalam penelitian ini menggunakan variabel intervening yaitu penerapan sistem akuntansi keuangan daerah.

Berdasarkan uraian diatas, maka peneliti mengambil judul **“Pengaruh Aspek Personal dan Aspek Sistem Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah”** (Studi Komparatif pada Pemerintah Kabupaten Cilacap dan Kabupaten Banyumas).

B. Batasan Masalah Penelitian

Batasan masalah dalam penelitian ini berfokus pada pengaruh aspek personal dan aspek sistem yang dimana aspek personal disini adalah kompetensi sumber daya manusia sedangkan aspek sistem terdiri dari teknologi informasi, pengendalian intern, dan sistem akuntansi keuangan daerah. Variabel independen dalam penelitian ini yaitu kompetensi sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi dan pengendalian intern. Variabel intervening dalam penelitian ini adalah penerapan sistem akuntansi keuangan daerah. Kualitas laporan keuangan daerah sebagai variabel

dependen. Dalam penelitian ini juga membandingkan pengaruh aspek personal dan aspek sistem terhadap kualitas laporan keuangan daerah di Kabupaten Cilacap dan Kabupaten Banyumas.

C. Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Apakah kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan daerah?
2. Apakah pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan daerah?
3. Apakah pengendalian intern berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan daerah?
4. Apakah penerapan sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan daerah?
5. Apakah kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan daerah melalui penerapan sistem akuntansi keuangan daerah?
6. Apakah pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan daerah melalui penerapan sistem akuntansi keuangan daerah?
7. Apakah pengendalian intern berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan daerah melalui penerapan sistem akuntansi keuangan daerah?

8. Apakah terdapat perbedaan pengaruh aspek personal dan aspek sistem terhadap kualitas laporan keuangan daerah di Kabupaten Cilacap dan Kabupaten Banyumas?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka penelitian ini bertujuan untuk menemukan bukti empiris atas hal-hal sebagai berikut:

1. Untuk mendapatkan bukti empiris pengaruh positif dari kompetensi sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan daerah.
2. Untuk mendapatkan bukti empiris pengaruh positif pemanfaatan teknologi informasi terhadap kualitas laporan keuangan daerah.
3. Untuk mendapatkan bukti empiris pengaruh positif pengendalian intern terhadap kualitas laporan keuangan daerah.
4. Untuk mendapatkan bukti empiris pengaruh positif penerapan sistem akuntansi keuangan daerah terhadap kualitas laporan keuangan daerah.
5. Untuk mendapatkan bukti empiris pengaruh positif dari kompetensi sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan daerah melalui penerapan sistem akuntansi keuangan daerah.
6. Untuk mendapatkan bukti empiris pengaruh positif dari pemanfaatan teknologi informasi terhadap kualitas laporan keuangan daerah melalui penerapan sistem akuntansi keuangan daerah.
7. Untuk mendapatkan bukti empiris pengaruh positif dari pengendalian intern terhadap kualitas laporan keuangan daerah melalui penerapan sistem akuntansi keuangan daerah.

8. Untuk mendapatkan bukti empiris perbedaan pengaruh aspek personal dan aspek sistem terhadap kualitas laporan keuangan daerah di Kabupaten Cilacap dan Kabupaten Banyumas.

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi pengembangan keilmuan akuntansi khususnya di bidang akuntansi pemerintah daerah untuk mengetahui bagaimana cara untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan daerah di Kabupaten Cilacap dan Kabupaten Banyumas.

2. Manfaat Praktis

- a. Masyarakat, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan informasi untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pentingnya kualitas laporan keuangan daerah.
- b. Perguruan Tinggi, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi bagi pihak-pihak yang akan melakukan penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan penelitian ini.
- c. Pemerintah daerah, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberi informasi tambahan berupa masukan yang nantinya berguna dalam penyusunan laporan keuangan daerah.